

PERPINDAHAN PARTAI DAN EFEKNYA TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN*Party Switching and the Effect on Political Party System***Andi Ali Armunanto**

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
email: a.armunanto14@gmail.com

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perpindahan partai yang dilakukan oleh politisi. Penulis mencoba untuk melihat pada berbagai faktor yang dapat mendorong politisi untuk membuat pesta beralih. Selain itu, penulis juga mencoba untuk melihat apa yang jangka panjang dan jangka pendek efek beralih pada partai politik dan sistem partai. Data yang ditampilkan dalam karya tulis ini adalah data yang berasal dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang berbeda.

Kata kunci: Partai politik, Partai beralih, sistem partai

ABSTRACT

This paper is aimed to examine the phenomenon of party switching that conducted by politicians. Author tries to look at the various factors that could encourage politicians to make the party switching. In addition, the authors also try to see what is the long-term and short-term effects of party switching on political party and party system. Data shown in this paper is the data that derived from researches that conducted by some researchers previously, and it is analyzed by using a different approach.

Keywords: Political Party, Party Switching, Party System

Pendahuluan

Perubahan tatanan politik besar-besaran yang melanda Indonesia sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, telah banyak mempengaruhi cara pandang dan perilaku para politisi. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan serta seabreg kebebasan lainnya telah merubah cara pandang orang-orang dalam memaknai demokrasi. Salah satu yang terimbas dari perubahan tatanan politik ini adalah partai politik.

Partai politik selain Golkar pada masa orde baru, tidak banyak mendapat kebebasan. Partai-partai pada saat itu banyak mengalami intervensi dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan stabilitas politik yang menjadi jargon pemerintah orde baru. Namun jargon ini sebenarnya juga sekaligus sebagai sebuah jaring pengaman untuk mempertahankan *status quo* Golkar sebagai partai yang berkuasa dengan menekankan pergerakan partai-partai lain. Dalam kondisi politik yang seperti ini isu loyalitas terhadap

partai menjadi salah satu bagian penting dari isu perpolitikan saat itu karena partai lain selain Golkar juga harus mempertahankan ritme politik dan eksistensinya disetiap pemilu. Kader-kader partai lain yang tidak tahan dengan tekanan yang dilakukan pemerintah akan mencari aman dan berpindah ke Golkar.

Tahun-tahun setelah runtuhnya orde baru, membawa begitu banyak perubahan dalam tatana politik Indonesia. Dimasa awal reformasi, partai-partai tumbuh bak jarum dimusim hujan. Partai dari berbagai jenis ideologi dan *platform* dibentuk dan didaftarkan pada otoritas pemilu dan menjadi peserta yang meramaikan pentas pemilu. Ada ratusan partai yang terbentuk pasca reformasi, meski tidak semuanya menjadi pemilu, namun hal tersebut menjadi indikator bahwa kehidupan demokrasi telah memasuki sebuah era baru yang lebih fair. Persaingan politik antara partaipun tidak kalah sengitnya, meski pada akhirnya hanya menyisakan beberapa partai yang bertahan dalam sistem kepartaian.

Dalam lembaga legislatif, partai politik menjadisebuah lembaga sentral yang menjalankan semua peran dalam pembuatan legislasi pemerintah. Di Indonesia partai mengisi semua komisi yang menanganiberbagai urusan pemerintah, dan mengatur alur legislasi. Partai mengurus segala urusan legislasi diparlemen sekaligus melakukan kontrol yang ketat terhadap eksekutif. Hal ini menyebabkan partai tidak hanya menguasai proses legislasi tetapi juga menentukan hasil legislasi dan pelaksanaannya. Dengan fungsi esensial yang dijalankan oleh partai politik tersebut, maka akan sangat rasional bila seseorang mengharapkan para legislator tetap setia melekat pada partai yang telah mengantarkannya untuk menduduki jabatan tersebut.

Pada negara-negara demokrasi yang telah maju, harapan akan setianya anggota partai politik terhadap partainya mungkin bisa diwujudkan seiring dengan kematangan institusi partai dan integrasi politik yang tercipta dalam demokrasi yang terkonsolidasikan (lipjhart; 1999). Dalam kondisi tersebut akan sangat tidak umum menemukan orang-orang yang meninggalkan partainya, apalagi pada masa pemilihan legislative. Namun pada kondisi tertentu, perpindahan politisi dari satu partai kepartai yang lain bisa saja terjadi. Sebagai contoh, di italia antara tahun 1996 hingga tahun 2004 sedikitnya sekitar 1/4 dari jumlah keseluruhan anggota parlemennya melakukan perpindahan partai (Heller & Mershon, 2005; 2008) dan lebih dari sepertiga anggota parlemen Brasil berpindah dari satu partai kepartai yang lain dari tahun 1986 hingga 1990 (mainwaring 1997). Para

pengamat juga telah mencatat fenomena bagaimana perpindahan partai yang dilakukan oleh anggota legislatif terjadi dengan intens di empat negara yaitu Perancis, Republik Czech, Hungaria dan Rusia selama tahun 1993 hingga 1995 (White, Rose, McAlister 1997). Hal yang sama juga terjadi di Amerika pada masa yang disebut oleh para ilmuwan politik sebagai masa *realignment* yaitu sekitar tahun 1997-2003 (Mershion & Svetshova 2007).

Di Indonesia sendiri, sejak memasuki era Reformasi dan ketika pemilu pertama pasca reformasi dilaksanakan pada tahun 1999, fenomena pergantian partai yang dilakukan oleh elit partai atau anggota legislatif mulai marak. Namun pada masa itu, kebanyakan yang terjadi adalah para elit partai dari partai-partai pada masa orde baru, ramai-ramai mendirikan partai politik baru dan memposisikan diri mereka pada puncak struktur partai politik. Namun setelah memasuki pemilu 2004, fenomena perpindahan antara partai mulai menunjukkan gejala peningkatan yang signifikan. Tidak hanya dilakukan oleh elit partai partai kecil yang tidak lolos ke parlemen, namun juga dilakukan oleh elit-elit partai yang ada diparlemen (legislator). Fenomena ini terus berlangsung hingga saat ini.

Hipotesa yang mengatakan bahwa para politisi akan memegang teguh *afiliasi* terhadap partainya secara meyakinkan telah gagal mempertahankan argumennya dengan bukti-bukti yang dikemukakan diatas. Fenomena diatas juga sekaligus memunculkan pertanyaan, kenapa politisi berpindah partai dan apa efeknya?

Metode

Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah kajianpustaka (*literature review*). Data-data yang digunakan adalah data-data yang telah ada sebelumnya yang merupakan hasil riset terdahulu. Data-data tersebut kemudian di analisis kembali dengan menggunakan pendekatan dan teori sehingga didapatkan hasil dan kesimpulan yang berbeda. Data-data yang ada dalam artikel ini dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal maupun artikel elektronik yang didapatkan dari internet.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Perpindahan Partai

Jika kita beranggapan bahwa politisi atau anggota legislatif adalah pemegang kursi partai mereka, maka validitas asumsi tersebut akan sangat bergantung pada bagaimana pemilih memilih dan memandang wakil atau politisi yang mereka pilih. Pada akhirnya hal

tersebut akan kembali lagi pada pembahasan tentang aturan pemilu aturan legislatif dalam sistem kepartaian. Jika pemilih memilih partai secara murni seperti yang terjadi pada *closed list system*, tanpa adanya referensi kepada kandidat secara personal, maka bisa dikatakan bahwapolitisi menjadi agen partai mereka. Namun jika sebaliknya para pemilih lebih cenderung memilih karena kedekatan personal yang terjalin dengan politisi seperti pada *open list system* maka hal ini bisa dikatakan bahwa politisi adalah agen dari pemilih yang menggunakan partai sebagai kendaraan politiknya.

Jika yang terjadi seperti pada premis pertama diatas, maka memang tidak wajar bagi seorang politisi untuk berpindah partai, karena mereka menjadi bagian yang integral dari partai politik. Namun jika premis kedua yang terjadi, maka akan sangat bisa ditoleransi jika seseorang melakukan perpindahan partai karena politisi adalah representasi dari pemilih. Pada sebagian besar negara yang menerapkan *open list system* dalam sistem pemilu mereka, akan ditemukan fenomena perpindahan partai politik yang besar. Hal ini terjadi karena open list sistem memungkinkan kandidat memasarkan diri secara personal, bukan hanya menjadi agen partai.

Data yang ada pada tabel dibawah ini menunjukkan fenomena perpindahan partai politik diberbagai belahan dunia dan juga indonesia :

Illustrations of the incidence of switching (% mps ever switched) in established and newdemocracies

<i>System</i>	<i>Term 1: % switched</i>	<i>Term 2:%</i>	<i>Term 3:%</i>	<i>Term 4: %</i>
Australia	1975–1977:3	1977–1980:0	1980–1983: 0	1983–1984:0
Brazil	1991–1994:39	1994–1998:33	1998–2001: 36	
Britain	1974–1979:1	1979–1983:5	1983–1987:0	1987–1992:1
Canada	1993–1997:2	1997–2000:4	2000–2004:9	2004–2006:2
Denmark*	1966–1968:3			1994–1998: 2
EP*	1989–1994:16			
France	1997–2002:4	2002–2007:10		
Germany	1969–1972:2	1972–1976:0.4	1976–1980:0.2	1980–1983: 1
Hungary	1990–1994:13	1994–1996: 6**		
Italy	1988–1992:27.6	1992–1994:33.7	1994–1996:34.4	1996–2000:32.1
Japan	2000–2003:7			
New Zealand*	1993–1996:12	1996–1999:6		

Romania	1992–1996: 11	1996–2000:17	2000–2004:10	
Russia	1993–1995:33			
South Africa	1999–2004:6	2004–2009:2**		
Spain	1982–1986:1	1986–1989:12	1989–1993:1	1993–1996:0.3
Turkey	1961–1965:22	1965–1969:21	1969–1973:23	1973–1977:10
Ukraine	1998–2002:56			
UnitedStates	1991–1993:0.2	1993–1995:0	1995–1997:1	1997–1999:0.5

* Unicameral legislature; all other data pertain to lower houses.

**Firsttwoyearsoffour-yearterm(Hungary);first2.5yearsoffive-yearterm(SouthAfrica).

Sources: Ágh (1999, 172, 182); Australia, Parliament (2007); Booyesen (2006, 735); Butler and

Butler (2000, 248–249); Canada, House of Commons (2006); Bille and Pedersen (2004,216);

Corstange (2000); Desposato (2006, 69; this volume); France (2007); Heller and Mershon (2008);

KatoandYamamoto(2005,Table2);LeftSocialistParty,Denmark,1997;mcelroy(2003, 4);

Mershon and Shvetsova (2007; 2008a); Miskin (2003, 17, 31); Nokken (this volume); Nokken

And Poole (2004, 555); Schindler (1999, 926–929); South Africa, Parliament (2008);Thames

(2005,9,24);TomásMallén(2002,207–216);Turan(1985,23).

Urutan Partai Politik Yang Ditinggalkan

Urutan	Partai Asal Yang Ditinggalkan	Jumlah	Persentase (%)
1.	PDIP	32	34,78
2.	GOLKAR	20	21,74
3.	DEMOKRAT	18	19,57
4.	PKB	9	9,78
5.	PAN	8	8,69
6.	PKS	2	2,17
7.	PPP	1	1,09
8.	PDS	1	1,09
9.	GERINDRA	1	1,09
	Total	92	100

Sumber : Lusua Astrika, 2009

Urutan Partai Politik Terfavorit

Urutan	Partai Politik Yang Dituju	Jumlah	Persentase (%)
1.	GERINDRA	40	43,48
2.	DEMOKRAT	23	25
3.	PDIP	9	9,78
4.	PKS	7	7,60
5.	PDS	4	4,35
6.	PAN	3	3,26
7.	PIS	3	3,26
8.	HANURA	1	1,09
9.	PKB	1	1,09
10.	GOLKAR	1	1,09
	Total	92	100

Sumber : Lusua Astrika, 2009

Sudah sejak beberapa dekade yang lalu, para ilmuwan partai politik mulai memberi perhatian terhadap masalah perpindahan partai yang dilakukan oleh politisi. Hal ini dipandang sebagai sebuah masalah baru yang muncul sebagai akibat dari interaksi dalam sistem kepartaian dan lingkungan sistem politik. Pada awalnya, para ilmuwan bersepakat untuk menjadikan ambisi politisi yang menjadi masalah sentral yang mempengaruhi pilihan partai dan perubahan partai yang dilakukan oleh politisi. Para ilmuwan melihat bahwa motivasi terbesar bagi seorang politisi untuk melakukan perpindahan partai politik adalah untuk mengjar ambisi personalnya. Seperti ketika seseorang tidak mampu untuk meraih ambisinya pada sebuah partai politik, maka hal tersebut akan menjadi motivasi baginya untuk berpindah kepartai lain. Hal lain yang mungkin serupa adalah ketika seseorang menganggap bahwa partai yang diikutinya saat ini, bukanlah partai yang tepat untuk meraih ambisinya yang besar melampaui kapasitas partainya untuk mewujudkan ambisinya tersebut.

Asumsi tersebut juga diperkuat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusua Astrika (2009). Dalam penelitiannya, Astrika menemukan bahwa sikap dan norma subjektif yang

dimiliki akan menjadi motivasi terbesar bagi seorang politisi untuk berpindah partai politik. Menurut persepsi mengenai harapan individu tertentu atau kelompok tertentu terhadap dirinya (*normative belief*) dan motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut (*motivation to comply*) akan mendorong seorang politisi untuk berpindah partai.

Aldrich dan Bianco (1992) mengemukakan bahwa ada tiga hal yang memungkinkan orang untuk mengejar ambisi personalnya dengan berganti partai politik antara lain:

a) Kekosongan jabatan pada partai.

Kekosongan jabatan pada sebuah partai (*office perk*) seringkali dianggap sebagai sebuah peluang bagi politisi. Tidak hanya politisi yang berasal dari partai kecil, namun hal tersebut juga terjadi sebaliknya. Bisa jadi politisi dari partai kecil melihat kekosongan jabatan pada partai besar sebagai peluang untuk mengakses jaringan politik yang lebih luas. Meskipun kadangkala, jabatan yang ditawarkan oleh partai besar sebenarnya lebih rendah dari jabatan sebelumnya yang dia tinggalkan dipartainya. Sebaliknya, politisi dari partai besar juga bisa saja melihat peluang pada kekosongan jabatan pada partai kecil. Utamanya jika jabatan yang ditawarkan adalah posisi yang strategis dan memungkinkan kekuasaan dan pengaruh politiknya menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan jabatan lamanya dipartai besar.

b) Akses terhadap kebijakan

Akses terhadap kebijakan juga menjadi motivasi terbesar bagi politisi untuk berpindah partai. Sebagian besar politisi berkeinginan untuk mampu mempengaruhi kebijakan. Hal ini dikarenakan bahwa akses yang diperoleh untuk mempengaruhi kebijakan, maka politisi tersebut akan mendapat keuntungan dari posisinya tersebut. Keuntungan tersebut bisa saja berupa keuntungan materil yang didapatkan dari kebijakan yang dipengaruhinya (*rente*) ataupun keuntungan *electoral*, karena dianggap telah berhasil memperjuangkan kepentingan dari konstituennya. Akses terhadap kebijakan akan memberikan insentif bagi politisi untuk tetap bertahan dalam posisinya sebagai hasil dari kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan.

c) Keuntungan Elektoral

Keuntungan *elctoral* yang dimaksud disini adalah keuntungan yang bisa didapatkan oleh seorang politisi ketika berpindah partai yang berupa perluasan akses terhadap pemilih dan suara (*votes*). Seorang politisi biasanya memiliki basis dukungan atau modal sosial yang besar, namun untuk menjamin keterpilihannya, seorang politisi harus memperluas aksesnya terhadap basis pemilih serta suara partai. Hal ini dimungkinkan, ketika seseorang berpindah partai, maka aksesnya pada basis pemilih berubah namun pemilih dari partai sebelumnya bisa jadi juga masih mampu untuk diakses sehingga dengan demikian basis dukungannya akan semakin luas. Namun ada juga politisi yang mengharapkan rembesan suara partai dari partai yang memiliki dukungan besar, sehingga memungkinkan dia untuk memanfaatkan rembesan suara partai tersebut untuk memperoleh keuntungan elektoral.

Ketiga hal diatas, tidakbisa dipungkiri sangat berpengaruh pada pilihan seorang politisi untuk berganti partai. Dengan kata lain, bahwa kekosongan jabatan, akses terhadap kebijakan serta keuntungan elektoral akan sangat memotivasi seseorang untuk berpindah partai. Ini terjadi karena setiap politisi ingin mamaksimalkan keuntungan dari berbagai aktifitas politik yang dijalannya. Hal senada dikemukakan oleh Desposato (2006) yang melihat bahwa perpindahan politisi dari satu partai kepartai yang lain sebagai produk dari perilaku startegis (*strategic behavior*). Lebih lanjut Desposato mengemukakan bahwa perpindahan partai merupakan hasil dari kalkulasi *Cost* dan *Benefit* yang dilakukan oleh seseorang politisi. Menurutnya, ketika *cost* yang harus dikeluarkan terlalu besar dan *benefit* yang diharapkan tidak sepadan, maka pada saat itu seorang politisi pasati aka mencari peluang yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kalkukasi peluang jika dia berada partai lain. Kalau hal tersebut dianggap menguntungkan, maka bisa dipastikan politisi tersebut akan berpindah partai politik.

Kato dan Yamamoto (2008) menilai bahwa perpindahan seseorang dari satu partai kepartai yang lainnya, tidak terlepas dari pengaruh insentif politik dan keterbatasan dalam lingkungan institusionalnya. Insentif politik seringkali digadang-gadang menjadi salah satu faktor yang memicu perilaku politik startegis. Karena setiap politisi selalu ingin bertahan pada posisinya atau memperoleh posisi yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap politisi harus mampu menciptakan sebuah struktur penunjang yang mampu mengamankan posisinya atau membantu untuk mencapai posisi yang lebih baik. Keterbatasan dalam

lingkungan institusional seringkali dianggap sebagai halangan bagi politisi untuk menciptakan insentif politik. Oleh karenanya, keterbatasan institusional ini seringkali akhirnya menjadi motivasi bagi seorang politisi untuk berpindah partai. Apalagi jika peluang untuk menciptakan insentif politik lebih terbuka pada partai yang lain hambatan dalam lingkungan institusionalnya lebih kecil.

Dari uraian beberapa hasil penelitian diatas, mengarahkan kita pada dua kategori besar yang menjadi faktor utama orang berpindah partai. Yang pertama adalah ambisi dari aktor politik untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam kegiatannya berpolitik. Setidaknya, persoalan eksistensi, efektifitas dan kekuasaan akan sangat mendominasi pikiran seseorang dalam berpolitik. Hal inilah yang menjadi pendorong utama ketika seseorang ingin terjun kedalam dunia politik. Politisi juga seringkali menjadi representasi dari sebuah kelompok sosial dan dengan perannya tersebut, eksistensinya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas kelompoknya. Selain itu akses terhadap kekuasaan juga akan memudahkanseseorang untuk mewujudkan semua tujuan politiknya maupun kepentingan kelompok yang diwakilinya.

Faktor yang kedua adalah faktor institusional. Persoalan institusional juga menjadi salah satu motivasi kenapa seseorang berganti partai politik. Keterbatasan institusi partai, kuatnya persaingan politik dalam institusi dan lemahnya insentif politik bisa saja memicu terjadinya perpindahan partai politik oleh politisi. Pada demokrasi yang lebih maju, perpindahan partai menjadi fenomena langka karena partai politik telah terinstitusionalisasi dengan baik dan mampu menyediakan akses politik dan insentif politik yang besar bagi anggotanya. Hal inilah yang kemudian menjelaskan, kenapa, negara-negara dengan sistem demokrasi yang lebih maju, perpindahan politik menjadi fenomena yang langka.

Efek Perpindahan Partai terhadap Sistem Kepartaian

Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh politisi, tentunya akan membawa dampak tersendiri bagi sistem kepartaian. Dalam hal ini, sistem kepartaian sebagai sebuah perwujudan interaksi antar partai politik dan antara partai politik dengan masyarakat akan mendapatkan pengaruh dari perpindahan partai yang dilakukan oleh politisi. Bukan saja pengaruhnya terhadap sistem kepartaian secara langsung, tetapi juga pengaruhnya kepada masyarakat dalam memandang partai politik sebagai sebuah institusi politik.

Masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri sebagai masyarakat kolektif, memberikan reaksi terhadap perilaku politisi yang terjadi didalam partai sebagai ”*negative public mood*“ (pengalaman perasaan yang negatif dalam kehidupan politik setiap harinya). Dengan demikian, akan terjadi interaksi dalam masyarakat untuk mengembangkan sikap negatif terhadap partai – partai politik tersebut (Iskandar, 2002). Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perilaku memilih dalam masyarakat. Sentimen ini bisa saja terus berkembang dan menjadi sebuah *anty party* sentiment jika tidak dilakukan revitalisasi partai dan perbaikan citra partai politik di masyarakat (Armunanto, 2006). Perpindahan politisi dari satu partai kepartai yang lain juga menimbulkan *negatif public mood* terhadap partai politik.

Dalam jangka waktu yang lama jika sentimen negatif terhadap partai politik terus dibiarkan akan melahirkan *public distrust* (Katz & Mair, 2001). Kondisi dimana publik tidak lagi *awaredengan* dengan keberadaan partai politik dan selanjutnya yang terjadi adalah terbentuknya hubungan politik yang lebih personal antara politisi dengan masyarakat pemilih. Hal ini akan mematikan partai politik secara institusional karena politik menjadi lebih personal. Kondisi ini dikenal dengan istilah *party deallignment* (Linz, 2001).

Dampak lain yang mungkin timbul dari perpindahan partai politik yang dilakukan oleh politisi adalah dampaknya terhadap partai secara institusional. Perpindahan politisi dari satu partai kepartai yang lain bisa berakibat pada terpecahnya sebuah partai politik, kondisi yang sama memicu lahirnya partai politik yang baru. Namun hal yang sebaliknya mungkin juga terjadi yaitu perpindahan politisi dari satu partai kepartai yang lain juga bisa memicu terjadi penggabungan partai politik. Penelitian yang dilakukan oleh Laver dan kato (2001) menunjukkan bahwa perpindahan partai bisa memicu perpecahan ataupun penggabungan partai politik.

Di Indonesia, fenomena perpecahan partai dan munculnya partai politik baru, juga banyak dipicu oleh perpindahan partai yang dilakukan oleh politisi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang pernah mengalami masalah yang sama yaitu perpindahan anggotanya secara masif kepartai lain dan terbentuknya partai-partai baru sebagai pecahan dari PDIP. Hal yang sama juga terjadi dengan Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan pembangunan (PPP), Partai Gologan Karya

(Golkar) dan partai-partai Lainnya. Namun tidak jarang kita menemui ada perpindahan partai yang memicu terjadinya integrasi politik. Misalnya ketika beberapa partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu dan kemudian menyatakan diri bergabung dengan partai-partai besar untuk mendapat peluang politik yang lebih baik.

Lebih lanjut, perpindahan partai juga akan memicu *inter electoral change*, dalam sistem kepartaian. Yang dimaksud dengan *inter electoral change* adalah perubahan afiliasipemilih sebagai akibat dari perpindahan politisi dari satu kepartai yang lain(Laver & Benoit, 2003). Fenomena ini rawan terjadi pada negara yang menggunakan *open list system* dalam sistem pemilunya. Ini dikarenakan hubungan politik yang terjadi dalam *open list system* lebih bersifat pribadi dan mengerucut kepada kandidat atau politisi sehingga perpindahan politisi kepartai yang lain kemungkinan besar akan diikuti oleh pemilih yang lebih loyal kepada politisi dibandingkan dengan partainya. Dampak yang paling kelihatan adalah tidak stabilnya perolehan suara partai dalam setiap pemilu.

Penutup

Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas, bisa kita simpulkan bahwa perpindahan partai politik yang dilakukan oleh politisi, dipicu oleh keinginan politisi untuk mengajjar ambisi politiknya dan juga dipengaruhi oleh berbagai peluang serta lingkungan institusional partai politik itu sendiri. Ketiga hal tersebut menjadi motivasi utama seorang politisi berganti partai politik. Disisi lain, perpindahan yang dilakukan oleh politisi dari satu partai kepartai yang lain, akan mempengaruhi institusi partai dengan terjadinya ketidakstabilan dalam perolehan suara, perpecahan serta penggabungan partai politik.

Fenomena perpindahan partai sendiri secara tidak langsung akan memicu reaksi publik berupa sentimen negatif dalam memandang partai politik dan akan berakibat pada melemahnya hubungan partai politik dengan pemilihnya. Lebih jauh, perpindahan partai juga akan memicu ketidakseimbangan dalam kontestasi politik dalam *open list system* akibat dari perubahan afiliasi pemilih yang lebih cenderung kepada kandidat dibanding partai politik.

Daftar Pustaka

Aldrich, John H., and William T. Bianco. 1992. "A *Game-Theoretic Model of Party Affiliation of Candidates and Office Holders*" *Mathematical and Computer Modelling* 16(8/9):103–116.

Ames, Barry. 2001. *The Deadlock of Democracy in Brazil*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Armunanto, Ali. 2006. Kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik. Tesis.

Astrika, Lusia. 2009. *Intensitas perpindahan Partai Politik; Sebuah Tinjauan Sikap dan Norma Subjektif Politisi*. Makalah.

Bille, Lars dan Karina Pedersen. 2004. "Electoral Fortunes and Responses of the Social Democratic Party and Liberal Party in Denmark: Ups and Downs" in *Political Parties and Electoral Change*, ed. Peter Mair, Wolfgang C. Müller, and Fritz Plasser, 207–233. London and Thousand Oaks, CA: Sage.

Booyesen, Susan. 2006. "The Will of the Parties versus the Will of the People? Defections, Elections, and Alliances in South Africa." *Party Politics* 12 (6):

Canon, David T., dan David J. Sousa. 1992. "Party System Change and Political Career Structures in the U.S. Congress." *Legislative Studies Quarterly* 17 (3):

Carey, John M., dan Matthew Soberg Shugart. 1995. "Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas." *Electoral Studies* 14 (4, December)

Castle, David, and Patrick J. Fett. 2000. "Member Goals and Party Switching in the U.S. Congress." in *Congress on Display, Congress at Work*, ed. William T. Bianco, 231–241. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Heller, William B. 1997. "Bicameralism and Budget Deficits: The Effect of Parliamentary Structure on Government Spending." *Legislative Studies Quarterly*

Heller, William B. 2007. "Divided Politics: Bicameralism, Parties, and Policy in Democratic Legislatures." *Annual Review of Political Science*

Heller, William B., and Carol Mershon. 2005. "Party Switching in the Italian Chamber of Deputies, 1996–2001." *Journal of Politics*

Heller, William B., and Carol Mershon. 2008. "Dealing in Discipline: Party Switching and Legislative Voting in the Italian Chamber of Deputies, 1988–2000." *American Journal of Political Science*

Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar. 2015. *Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak*. Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kato, Junko and Kentaro Yamamoto. 2005. "Competition for Power: Party Switching as a Means for Changing Party Systems in Japan." Paper presented.

Laver, Michael and Kenneth Benoit. 2003. "The Evolution of Party Systems between Elections." *American Journal of Political Science*.

Laver, Michael and Norman Schofield. 1990. *Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

Lipset, Seymour Martindan Stein Rokkan. 1967. *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. New York: Free Press.

Mainwaring, Scott P. 1999. *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Mainwaring, Scott P. and Aníbal Pérez Liñán. 1997. "Party Discipline in the Brazilian Constitutional Congress." *Legislative Studies Quarterly*.

Mainwaring, Scott P. and Mariano Torcal. 2005. "Party System Institutionalization and Party System Theory after the Third Wave of Democratization." Unpublished paper, Kellogg Institute, University of Notre Dame.

Mershon, Carol and Olga Shvetsova. 2005. "Electoral Cycles and Party Switching: Opportunistic Partisan Realignment in Legislatures." Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL.

Mershon, Carol dan Olga Shvetsova. 2007. "Institutional Determinants of Party System Change and Party Volatility in Legislatures." Unpublished paper, University of Virginia, Charlottesville, VA.

Mershon, Carol and Olga Shvetsova. 2008a. "Parliamentary Cycles and Party Switching in Legislatures." *Comparative Political Studies*.

Mershon, Carol and Olga Shvetsova. 2008b. "Party Switching in Sitting Parliaments and the Midterm Effect." Paper presented at Annual Joint Sessions of the European Consortium for Political Research, Rennes, France.

Mershon, Carol and Timothy P. Nokken. 2008. "Party Formation and Changes of Party Affiliation among Legislators: The United States and Great Britain in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries." Paper presented at the annual meetings of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL.

Miskin, Sarah. 2003. "Politician Overboard: Jumping the Party Ship." Unpublished paper, Parliament of Australia: Parliamentary Library—Politics and Public Administration Group.

Stokes, Susan C. 1999. "Political Parties and Democracy." *Annual Review of Political Science*.

Strøm, Kaare. 1990. "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties." American Journal of Political Science 34 (2, May).